

Polisi Publik dan Keamanan Swasta : Suatu Pemahaman Awal

Mohammad Kemal Dermawan*

Abstrak

Sejak beberapa dekade lalu lingkungan kepolisian telah berubah dari satu bentuk kepolisian yang didominasi dan didanai negara sebagai polisi "publik", cenderung menuju "kebijakan" pemolisian yang dibagi antara polisi publik dan aktor-aktor keamanan swasta. Keamanan swasta telah diperluas untuk memenuhi kebutuhan warga negara, dan pemerintah semakin beralih ke sektor swasta untuk menyediakan layanan kepolisian yang lebih fleksibel, lebih murah, dan dalam beberapa kasus yang lebih khusus daripada yang dapat dicapai oleh polisi publik. Saat ini, salah satu kesulitan terkait dengan istilah keamanan swasta adalah mendefinisikan dari mana keamanan swasta itu dimulai dan di mana keamanan swasta itu berakhir, sehingga pengaturan yang lebih baik dibutuhkan untuk tidak terdapat kecenderungan pengalihan tanggung jawab dari polisi publik ke aktor keamanan swasta dalam pencegahan kejahatan di masyarakat.

Kata Kunci : *Polisi Publik, Keamanan Swasta, kemitraan, Pengalihan Tanggung Jawab, Sinergi*

Pengantar

Dalam masyarakat demokrasi, reformasi kepolisian merupakan proses yang berkesinambungan. Bahkan lembaga kepolisian yang paling profesional dan canggih pun terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam mencegah kejahatan, mendeteksi dan mengungkap kejahatan, meningkatkan integritas organisasi mereka serta legitimasi mereka di mata publik (Sarre, R. 2005). Namun demikian, untuk sebuah reformasi kepolisian yang berhasil, perlu dukungan eksternal maupun internal. Tanpa kepemimpinan yang selalu berkomitmen untuk perbaikan dalam organisasi kepolisian, tuntutan eksternal reformasi tidak akan menembus keberhasilan layanan polisi sehari-

hari di lini depan. Tanpa dukungan eksternal untuk reformasi, pimpinan polisi yang paling berkomitmen pun akan kehilangan dukungan politik dan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan proses reformasi yang telah dicapai (Hardy, S., & Prenzler, T. 2002).

Mungkin sumber yang paling menjanjikan dari dukungan eksternal untuk reformasi kepolisian adalah komunitas bisnis swasta. Perusahaan swasta memiliki dinamisme, kreativitas, dan kekayaan sumber daya yang dapat berguna untuk menjadi reformis dalam lembaga kepolisian. Pada saat yang sama, kemitraan dengan bisnis swasta, jika kurang terstruktur, dapat mengikis profesionalisme dan legitimasi organisasi polisi (Haxton, H. 1998). Para pemimpin polisi akan sukses mengantarkan reformasi jika mereka menyambut atau mempromosikan kemitraan dengan

* Dr. Mohammad Kemal Dermawan; Dosen Tetap pada Departemen Kriminologi, Fisip-UI dan kini menjabat sebagai Ketua Departemen Kriminologi Fisip-UI

komunitas bisnis secara berhati-hati dan tidak untuk mengadopsi motif keuntungan dari bisnis mereka sendiri, atau untuk mengasumsikan bahwa semua orang bisnis harus memahami kontrol kualitas bagi layanan pelanggan.

Kemitraan Antara Polisi Publik dan Keamanan Swasta

Kepolisian yang beroperasi sebagai unit yang terisolasi dalam masyarakat tidak bisa berharap untuk mencapai tujuannya mencegah dan mendeteksi kejahatan secara efektif. Untuk mengembangkan kepolisian yang benar-benar sukses maka kepolisian tersebut harus memiliki keterlibatan publik, kepercayaan publik dan kerjasama publik. Untuk itu penting bagi kepolisian untuk mempertahankan dan mengembangkan konsep pemolisian komunitas (Sarre, R. 2005).

Berbagai pihak yang berpartisipasi secara aktif akan diperlukan untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pencegahan kejahatan secara nasional yang sukses. Sementara Pemerintah, Administrasi Publik, Pemolisian dan Sektor Korporasi dianggap sebagai beberapa aktor strategis, sektor keamanan swasta belum diperhitungkan sebagai pihak yang juga dapat berkontribusi secara memadai. Padahal sektor keamanan swasta ini termasuk pihak yang dapat melindungi produk dan jasa mereka terhadap kerentanan gangguan kriminal (Haxton, H. 1998).

Praktisi manajemen keamanan profesional dan personil penegakan hukum yang inovatif telah diakui memiliki potensi besar bagi hubungan kolaborasi antara polisi dan sektor keamanan swasta. Hal ini telah dieksplorasi secara rinci di Amerika Serikat (Sarre, R. 2005) dan sekarang sedang aktif diteliti oleh banyak orang di berbagai negara ((Hardy, S., & Prenzler, T. 2002). Tidak ada keraguan bahwa untuk menghambat pertumbuhan kejahatan, pendekatan berbasis

masyarakat yang terkoordinasi secara baik sangat diperlukan. Bukan saatnya lagi kita semua menggantungkan harapan kepada Polisi untuk dapat mengendalikan dan mencegah kejahatan tanpa dukungan aktif dari masyarakat luas. Banyak bukti memperlihatkan bahwa banyak mantan polisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pencegahan kejahatan dan keselamatan publik bergerak di sektor keamanan swasta dan banyak dari mereka memiliki keahlian yang dapat meningkatkan keberhasilan pencegahan kejahatan dan program keselamatan publik secara nasional.

Mendefinisikan Keamanan Swasta

Keamanan dapat didefinisikan sebagai keadaan yang di mana individu atau kelompok dapat mengejar tujuan mereka tanpa gangguan atau kerusakan dan tanpa takut kehilangan atau cedera. Dengan demikian, individu atau kelompok yang menikmati keamanan berarti mampu untuk melanjutkan kegiatan atau usaha mereka tanpa gangguan baik dari ancaman kejahatan, atau bahkan dari bencana alam. Terkait dengan pengertian tersebut, maka harus diakui bahwa keamanan memiliki dua basis : individu atau kelompok sebagai aktor yang bergerak dalam bidang keamanan dan yang berlaku untuk atau menyangkut sebuah organisasi sebagai penyelenggara dan piha yang memperkerjakan tenaga da penyedia jasa keamanan (Hardy, S., & Prenzler, T. 2002).

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat hingga sekarang sedang dilakukan oleh organisasi tradisional yang dikenal sebagai "Polisi", meskipun dewasa ini terlihat suatu peningkatan kecenderungan adanya eksistensi dan penggunaan badan yang didanai swasta, yang sering disebut sebagai "keamanan swasta" (Sarre, R. 2005). Haxton (1998) membahas definisi keamanan swasta dan dia memilih untuk tidak menggunakan istilah "polisi swasta" untuk menggambarkan keamanan swasta adalah

industri yang sangat luas, dan bahwa terdapat orang-orang yang bekerja di industri itu. Hardy, S., dan Prenzler, T. (2002) juga menekankan bahwa konsep “keamanan” adalah kompleks. Sementara, Sarre, R. (2005) bekerja keras untuk membatasi definisi keamanan yang berkisar pada perlindungan informasi, orang dan harta benda dan menekankan bahwa ada perbedaan antara polisi dan keamanan swasta berkenaan dengan status hukum, kontrol dan akuntabilitas mereka.

Secara umum diterima bahwa kata “polisi” berkaitan dengan kepolisian dari pemerintah dan “keamanan swasta” adalah perusahaan yang lebih luas dari kepolisian publik, dengan fungsi yang lebih luas (Sarre, R. 2005). Memang, pemolisian membawa konotasi kontrol pemerintah dan otoritas pemerintah (Hardy, S., & Prenzler, T. 2002) meskipun digunakan oleh instansi pemerintah lainnya daripada mereka yang memberikan layanan pemolisian komunitas.

Saat ini, salah satu kesulitan terkait dengan istilah keamanan swasta adalah mendefinisikan dari mana keamanan swasta itu dimulai dan di mana keamanan swasta itu berakhir (Hardy, S., & Prenzler, T. 2002). Beberapa waktu lalu, keamanan swasta hanya diartikan sebagai pekerjaan yang melibatkan penjaga keamanan yang secara umum diterima sebagai milik industri atau perusahaan menyediakan jasa tenaga keamanan. Bagaimana pula dengan profesi yang muncul dari manajemen risiko keamanan, yang berkaitan dengan penilaian ancaman keamanan dan risiko, serta pengembangannya sesuai strategi untuk melawan risiko tersebut dengan biaya yang efektif dan efisien. Uraian berikut ini cukup menggambarkan perbedaan mendasar antara keamanan swasta dan polisi.

“... perusahaan keamanan swasta adalah salah satu aktor keamanan yang sangat canggih dan sebagian besar kehadirannya disebabkan adanya sistem desentralisasi dalam kontrol

sosial di masyarakat.. Hal ini cukup berbeda dengan otoritas polisi yang berasal dari kekuatan negara yang timbul dari undang-undang pidana Konsepsi keamanan swasta ditandai dengan penggunaan sistem pengolahan sengketa secara internal, sistem yang paralel dengan sistem peradilan pidana umum, dan dalam banyak kasus menggantikannya, tetapi yang juga berbeda dalam berbagai fitur penting sebagai penyelenggara keamanan”. (Sarre, R. and Prenzler, T. 1999)

Disiplin keamanan tampaknya berkembang menjadi dua aliran. Pertama, mereka yang dapat diidentifikasi sebagai orang yang bergerak di bidang atau area “perdagangan”, seperti tukang kunci, perancang pintu keamanan dan produsen detektor serta alat-alat keamanan lainnya, petugas patroli keamanan area perusahaan dan kantor, serta penyedia tenaga pemantauan alarm. Kedua adalah pengembangan “profesi” dari manajemen keamanan yang kini bergerak menuju kualifikasi akademik dan termasuk analisis keamanan, manajer keamanan dan agen penyelidikan spesialis seperti yang terdapat dalam bidang penelitian penipuan (Hardy, S., & Prenzler, T. 2002).

Seorang praktisi telah mendefinisikan industri keamanan swasta dalam hal tugas dan operasinya sebagai berikut :

“... hampir selalu di dalam batas area bangunan industri dan komersial swasta di pagar pabrik, di mana polisi tidak bisa menyeberang secara sah kecuali dengan Undang-Undang atau keadaan khusus lainnya, fungsi keamanan akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Tugas utama kami adalah untuk mencegah kehilangan dan meminimalkan risiko

bagi orang-orang dan properti di tempat-tempat pribadi, dan kami memiliki peran fungsi keamanan dan ketertiban di ruang yang tidak dilakukan oleh sektor keamanan publik” (Sarre, R. and Prenzler, T. 1999).

Ada kebutuhan bagi masyarakat untuk mengurangi dan mencegah kejahatan, sementara itu, ada motivasi bagi polisi untuk terlibat dengan industri keamanan swasta. Hal ini akan senada ketika polisi membentuk kemitraan dengan komunitas tertentu di dalam masyarakat dalam konteks pemolisian komunitas. Pengaturan kemitraan dengan industri keamanan swasta akan menunjukkan tujuan untuk mengurangi kejahatan dengan mengorganisir kelompok untuk bekerja sama satu sama lain dan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan mencoba untuk mengurangi kejahatan.

Timbul pertanyaan – “Mengapa harus ada pengaturan kemitraan antara polisi dan industri keamanan swasta?” Banyak pakar percaya bahwa hal itu didasari pada argumen bahwa polisi dan keamanan swasta bersama-sama ada dalam bisnis pencegahan kejahatan dan oleh karena itu ada persamaan peran yang dapat mendorong pembentukan kemitraan. Polisi secara bijak, seringkali menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengurangi kejahatan tanpa bantuan dari masyarakat luas. Mengutip pendapat Sarre dan Prenzler (1999) :

“Lembaga kepolisian seringkali menyatakan keterbatasan mereka untuk melaksanakan tugasnya melindungi masyarakat (karena sebab anggaran dan sumberdaya yang sering dinyatakan tidak mencukupi) sehingga daya tarik untuk ikut bertanggung jawab bagi keamanan swasta menjadi meningkat”.

Namun, manfaat untuk keamanan swasta

lebih diperdebatkan. Apa yang menjadi motivasi untuk keamanan swasta untuk terlibat dengan polisi ? Tentu saja, setiap kemitraan dengan polisi akan memberi mereka lebih banyak kredibilitas. Bagi mereka untuk memiliki akreditasi yang diakui oleh polisi akan memberi mereka berdiri lebih besar dalam masyarakat dan karenanya juga bisnis yang lebih kuat. Juga, standar kualifikasi akan lebih memungkinkan pemain yang ada untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. sementara pada saat yang sama lebih sulit bagi pemain baru untuk memasuki industri tersebut. Karena dirasakan kurangnya kualifikasi formal dan kredibilitas di antara praktisi di industri keamanan, tampaknya bahwa beberapa organisasi (dan individu) tidak percaya bahwa keamanan swasta sektor ini mampu memberikan kontribusi bagi program pencegahan kejahatan komunitas yang profesional (Hardy, S., & Prenzler, T. 2002)..

Hal di atas tercermin, misalnya, dalam pandangan beberapa polisi, yang tampaknya memiliki persepsi bahwa keamanan pribadi merupakan pesaing, bukan lagi perangkat tambahan atau peran kepolisian terbatas. Menyadari pertumbuhan dan kecanggihan pemantauan sistem keamanan elektronik untuk membangun keamanan dan deteksi dini, maka secara pesat telah terjadi pertumbuhan organisasi keamanan swasta yang mencakup produsen, *installer* dan orang-orang yang memonitor sistem ini. Daerah keamanan swasta ini tidak akan dianggap kalah dengan sistem polisi. Polisi justru menggunakan jasa keamanan swasta untuk menginstal sistem ini dan pelatihan-pelatihan bagi anggota polisi di area polisi publik.

Dalam hubungan antarapoliisi dan keamanan swasta dalam bisnis pencegahan kejahatan ini, sifat kemitraan harus tetap dipertahankan untuk kebutuhan saling mendukung di anatar keduanya namun harus dalam posisi polisi adalah aktor utama. dan pengamatan ini juga ditemukan oleh peneliti lain. Hal ini diperkuat

oleh pendapat Sarre dan Prenzler (1999) :

“Perbedaan penting antara polisi dan keamanan swasta adalah bahwa polisi menempati peran utama dan kepemimpinan dalam hal ini kemitraan. Personel keamanan swasta dipandang sebagai mitra dalam bisnis menjaga ketertiban, membantu polisi dalam kegiatan mereka dan dalam hal-hal tertentu melakukan tugas-tugas mereka”.

Namun demikian, setiap kemitraan masa depan harus pada posisi yang sama - tidak akan ada mitra utama atau pendukung, jika hubungan kerja secara nyata terjadi. Juga, ada isu-isu yang berhubungan dengan motif keuntungan versus publik. Hal ini diakui bahwa ada “master” yang berbeda dalam industri yang berbeda tetapi peran yang sama dan pelanggan kedua industri tumpang tindih. Hal ini mungkin memiliki keuntungan bahwa masyarakat dapat mengambil manfaat, meskipun mungkin menyebabkan anggota individu dari industri keamanan swasta merasa bahwa mereka memiliki lebih banyak kekuasaan daripada mereka yang benar-benar memilikinya. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk keamanan swasta menjadi lebih akuntabel (Sarre, R. and Prenzler, T.1999).

Ada peluang yang terjadi dari kemitraan antara polisi dan keamanan swasta, terutama dalam bisnis yang sama mengurangi kejahatan tetapi mereka melakukannya untuk berbeda alasan. Polisi ada terutama untuk kepentingan publik sementara keamanan swasta ada untuk membuat keuntungan, tetapi keduanya mengurangi kejahatan. Tentunya, ini memberikan argumen untuk membangun dan memperkuat kemitraan yang ada antara polisi dan keamanan swasta. Kesulitan akan terjadi ketika ada konflik antara kepentingan publik dan motif profit, tetapi potensi keuntungan lebih besar daripada kerugian.

Kemitraan strategis antara polisi, badan pemerintah dan non-pemerintah serta masyarakat, harus tetap berorientasi pada tujuan Kepemimpinan, Kemitraan dan *Stakeholder*. Untuk itu program-program yang dapat diambil, antara lain (Livingstone, K. and Hart, J. 2003) :

- (1) Mengembangkan posisi polisi bersama dalam kebijakan dan prinsip-prinsip yang mendorong kemitraan strategis dengan kelompok-kelompok yang relevan.
- (2) Mengembangkan rencana aksi pada bidang utama dalam kemitraan dengan masyarakat dan mitra lainnya..

Pembagian Peran dan Wewenang

Keselamatan dan keamanan publik dipahami sebagai tanggung jawab negara untuk warganya sebagai “hak sosial” yang telah disepakati antara pemerintah dan warganya (Livingstone, K. and Hart, J. 2003), ditegakkan melalui kepolisian, membangun garis akuntabilitas antara polisi yang didanai publik dan warga negara mereka, menyediakan layanan secara non-profit. Bayley (1998) menggambarkan kebijakan publik yang dimonopoli oleh pemerintah pasti dalam beberapa hal mengalami restrukturisasi yang memungkinkan keamanan swasta untuk muncul dan berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, secara signifikan, batas-batas antara peran polisi publik dan keamanan swasta telah menjadi kurang jelas, meskipun berbagai derajat dimana keamanan swasta dan Polisi publik diatur, menciptakan kesenjangan akuntabilitas antara Polisi publik yang sangat “diatur” dan keamanan swasta yang “hampir tidak diatur”.

Johnston, (1992) menjelaskan istilah “pengawasan” sebagai “fungsi sosial”, sementara istilah “Polisi” mengacu pada agen pemerintah. Menurut Johnston, (1992) kepolisian adalah bentuk kontrol sosial. Seperti banyak aspek kehidupan dapat dipengaruhi oleh kontrol sosial, Cohen, (Johnston, 1992) mendefinisikan

kontrol sosial dalam konteks kepolisian sebagai respon (masyarakat) yang terorganisir terhadap perilaku menyimpang. Reiner (Johnston, 1999) menjelaskan kepolisian sebagai pengawasan dan ancaman hukuman atau sanksi. Peran ini biasanya dilakukan oleh agen-agen yang didanai oleh negara yang dikenal sebagai polisi publik sepanjang sisi agen lain, yang baik dapat didanai swasta atau sukarelawan yang tidak dibayar yang dikenal sebagai keamanan pribadi (Shapland, J. and van Outrive, L. [eds]. 2009), semua bertanggung jawab kepada hukum dan warga Negara.

Industri keamanan swasta yang luas terdiri dari berbagai sektor yang meliputi layanan di mana terdapat pengawas pintu bagi bangunan, penjaga keamanan untuk tugas-tugas statis dan patroli, detektif swasta, pengawal pribadi, uang tunai dan barang berharga dalam perjalanan, dan lain-lain. Sektor lainnya adalah seperti sistem CCTV dan perangkat keamanan elektronik lainnya, (Shapland, J. and van Outrive, L. [eds]. 2009).

Dalam beberapa hal, peran tradisional dipenuhi oleh para agen keamanan swasta sehingga memiliki akibat yang tumpang tindih dengan apa yang dilakukan oleh petugas dari kepolisian publik. Hal ini disebabkan sebagian karena modernisasi industri keamanan swasta yang telah berkembang selama bertahun-tahun sebagai sektor keamanan yang difasilitasi melalui pelatihan karyawan. Dalam Shearing dan kawan-kawan, (Shapland, J. and van Outrive, L. [eds]. 2009) ditemukan bahwa sejak diperkenalkannya UU Swasta Industri Keamanan (2001) yang kemudian, salah satunya, berkembang dalam *Industri Security Authority* (SIA), membebaskan industri keamanan swasta dengan tanggung jawab meningkatkan keterampilan dan pelatihan profesionalisme bagi keamanan swasta yang telah meningkat melampaui pelatihan dasar keterampilan biasa, meliputi area seperti hukum tentang penggunaan kekuatan,

kesehatan dan keselamatan, menghadapi situasi kebakaran serta bom, dan sebagainya, (Sarre, R. and Prenzler, T.1999). Akibatnya, keamanan swasta telah menjadi sektor dengan posisi untuk mengambil lebih banyak peran termasuk yang peran tradisional dilakukan oleh polisi publik. Selanjutnya, Asosiasi Profesional Keamanan Internasional (IPSA) mendefinisikan agen keamanan pribadi sebagai individu yang berseragam atau non-berseragam yang digunakan untuk melindungi orang-orang, properti dan bangunan di dalam organisasi yang mempekerjakan mereka (Shapland, J. and van Outrive, L. [eds]. 2009).

Saat ini kita dengan mudahnya dapat menyaksikan munculnya sektor keamanan swasta terutama di kompleks perbelanjaan, rekreasi dan pusat olahraga yang menawarkan akses perlindungan tak terbatas kepada anggota masyarakat namun di satu sisi menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung atas nama organisasi non-pemerintah dan diawasi oleh agen-agen non-publik. Sepertinya, penerapan aturan keamanan oleh pihak swasta terkait dengan penggunaan tempat atau ruang publik, jika tidak diawasi agen-agen publik bisa jadi menyimpang dari "kontrak sosial" antara negara dan warganya (Shapland, J. and van Outrive, L. [eds]. 2009). Beberapa hal yang juga sering diperdebatkan terkait dengan wewenang dari sektor keamanan swasta ini antara lain adalah menangani perilaku anti-sosial tanpa intervensi polisi; memberhentikan orang, mengajukan pertanyaan kepada pengunjung yang menjurus penyidikan serta menyita obat-obatan, pisau dan alkohol dari seseorang yang diduga pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Terkait dengan hal di atas, komersialisasi kepolisian publik telah memainkan peran penting dalam mengaburkan batas-batas wewenang antara kepolisian swasta dan kepolisian publik sehingga melanda akuntabilitas polisi publik, sehingga warga diperlakukan sebagai pelanggan

yang membeli layanan polisi sebagai lawan warga menggunakan hak demokrasi yang berupa mendapatkan layanan polisi publik secara cuma-cuma (Sarre, R. and Prenzler, T.1999). Haxton (1998) mengacu pada perkembangan ini sebagai “marketisasi” dari kepolisian publik dan pergeseran peran dari peran yang berurusan dengan kejahatan beralih pada peran mencegah kejahatan, yang seakan-akan sah untuk diambil alih oleh sektor keamanan swasta. Hal ini bertambah nyata dengan bukti bahwa anggaran kepolisian “memaksa” polisi untuk lebih fokus pada layanan penegakan hukum dibandingkan dengan tujuan pencegahan kejahatan. Secara singkat, kondisi seperti itu dapat semakin memungkinkannya ekspansi “komersialisasi” oleh organisasi keamanan swasta dan meningkatkan pengaruh kepolisian swasta di kehidupan anggota masyarakat. Hal yang harus dijaga adalah meskipun keamanan swasta melakukan fungsi keamanan tradisional yang dilakukan oleh polisi publik, tidak selalu berarti pengalihan tanggung jawab oleh polisi publik untuk agen keamanan swasta.

Pengalihan tanggung Jawab, Kemitraan atau Sinergi?

Sinergi telah didefinisikan sebagai “manfaat yang dihasilkan dari penggabungan dua kelompok, orang, benda atau proses yang berbeda”. Istilah ini juga sering digunakan untuk menggambarkan efek gabungan yang lebih besar dari efek yang terpisah dari masing-masing elemen atau sektor. Namun, sinergi juga “sering dianggap sebagai jargon bisnis”. Banyak bukti menunjukkan bahwa polisi dan pemerintah dapat bekerja dengan sukses dengan keamanan swasta dengan cara sinergi yang nyata dalam pengurangan dan pencegahan kejahatan. Dalam jangka panjang, hal itu berarti pencurian, perampokan, penyerangan penggunaan narkoba, dan kejahatan lain akan menurun di suatu area publik. Hal ini juga harus berarti bahwa perasaan

keamanan dan kebebasan bagi orang-orang yang pergi untuk bekerja, belanja dan rekreasi tidak takut lagi akan kejahatan dibandingkan saat-saat sebelumnya (Shapland, J. and van Oustrive, L. [eds]. 2009).

Sementara itu, kemitraan dapat tercapai melalui pengaturan yang sederhana. Misalnya, kemitraan dapat melibatkan kerjasama antara polisi dengan instansi pemerintah serta perusahaan keamanan swasta dengan maksud untuk penyediaan layanan keamanan publik spesialis yang lebih murah dan efektif. Kemitraan juga dapat lebih kompleks dan luas, bermitra dalam arti yang dapat mencakup saran dari para ahli keamanan, adopsi teknologi keamanan (Sarre, R. and Prenzler, T.1999).

Istilah seperti “Kemitraan”, “Pemolisian Kemitraan” dan “kemitraan pencegahan kejahatan publik-swasta” juga membantu menghindari stigma terkait dengan istilah “privatisasi” dan “outsourcing” serta “komersialisasi pemolisian”. “Privatisasi” dan “outsourcing” sering dibayangkan sebagai hal yang menyiratkan pengurangan atau penggantian jasa pemerintah yang ada, termasuk penurunan kepemilikan infrastruktur dasar publik dan penurunan kondisi ketenagakerjaan pemerintah dan keamanan kerja (Sarre, R. and Prenzler, T.1999). Selain itu, *outsourcing* oleh pemerintah dapat menciptakan layanan yang tidak ada sebelumnya, termasuk jasa yang memberikan campuran penyediaan layanan swasta dan publik, atau layanan yang diperluas melalui penyediaan keamanan swasta. Contohnya termasuk sistem CCTV ruang terbuka, dan keamanan stadion olahraga.

Dari perspektif itu, fasilitasi keamanan swasta, termasuk melalui perjanjian kerjasama publik-swasta, dapat berpotensi signifikan meningkatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara. Hal ini terutama terjadi pada saat kontraksi ekonomi, ketika pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan anggaran dan

mengembalikan kepercayaan publik, sementara juga memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam bidang keamanan. Tapi itu juga berlaku di luar kemerosotan ekonomi - mengingat bahwa sekarang diakui bahwa polisi publik tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai karena luasnya dan kompleksitas kesempatan untuk kejahatan. Keamanan swasta dapat menambah, bukan menggantikan kepolisian publik dalam bidang-bidang atau konsentrasi tertentu (Sarre, R. and Prenzler, T.1999). Pada saat yang sama, ketika pemerintah memutuskan mereka harus memotong anggaran polisi, maka keamanan swasta adalah salah satu cara untuk mengisi kesenjangan sementara, asalkan tujuannya lebih berorientasi pada kepentingan publik daripada hanya pada kepentingan pribadi serta harus memuaskan dalam akuntabilitas kerjanya.

Banyak pakar yang mengatakan bahwa bentuk kemitraan atau *outsourcing* kepolisian tidak bermasalah. Namun di lain sisi, banyak keterbatasan kemitraan dapat dikaitkan dengan kekurangan dalam pelaksanaan, termasuk konsultasi yang kurang memadai dengan para pemangku kepentingan dan pemilihan intervensi yang tidak pantas atau terbelakang. Contohnya termasuk kegagalan untuk penerapan situs kamera CCTV dalam konsentrasi *hot spot* kejahatan yang cukup luas, serta pemantauan dan kemampuan respon yang tidak memadai (Sarre, R. and Prenzler, T.1999).

Kesimpulan

Uraian singkat ini menunjukkan bahwa keamanan swasta memainkan peran yang semakin penting dalam mencegah kejahatan. Ada pengakuan yang berkembang dari sekian banyak manfaat publik terkandung dalam perluasan sektor ini, termasuk melalui kemitraan pencegahan kejahatan publik-swasta dan *outsourcing* kepolisian bagi tugas-tugas keamanan. Ada ruang yang cukup bagi pemerintah untuk membuat lebih banyak

keterampilan dan keahlian keamanan swasta dalam memperluas jaminan keamanan publik dan mencegah kejahatan. Sementara polisi dan badan-badan pemerintah lainnya saat ini sering mengungkapkan dukungan untuk kerjasama publik-swasta terhadap pencegahan kejahatan, manfaat nyata perlu dioptimalkan melalui pendekatan yang lebih maju.

Daftar Bacaan

Bayley, D. (1998). *What works in policing*. New York: Oxford University Press.

Johnston, L. (1992) *The Rebirth of Private Policing*. London: Routledge.

Johnston, L. (2000) *Transnational Private Policing: The Impact of Global Commercial Security*. In Sheptycki, J.W.E. (ed.) *Issues in Transnational Policing*. London: Routledge, pp 21 – 42.

Johnston, L. and Shearing, C. D. (2003) *Governing Security: Explorations in Policing and Justice*. London: Routledge.

Sarre, R. (2005) *Researching Private Policing: Challenges and Agendas for Researchers*. *Security Journal*. Vol. 18, No. 3, pp 57 – 70.

Sarre, R. and Prenzler, T. (1999) *The Regulation of Private Policing: Reviewing Mechanisms of Accountability*. *Crime Prevention and Community Safety: an International Journal*. Vol. 1, No. 3, pp 17 – 28.

Livingstone, K. and Hart, J. (2003) *The Wrong Arm of the Law? Public Images of Private Security*. *Policing and Society*. Vol. 13, No. 2, pp 159 – 170.

Shapland, J. and van Outrive, L. (eds). (2009) *Police and Policing and Security: Social Control and the Public-Private Divide*. Montr é al: L' Harmattan, pp 179 – 194